

THE POLITICAL CORRELATION OF ETHNIC IDENTITY IN THE ELECTION OF THE 2018 LAMPUNG GOVERNOR

Kaukabilla Alya Parangu
IAIN Ponorogo, Indonesia
Kaukabilla@gmail

Abstract

General elections often involve identity politics in gaining sound sources, identity politics that are also used in a variety of ways ranging from ethnic identity culture, culture, to religion. Meanwhile, Lampung as one of the provinces that was used as a milestone in transmigration in Indonesia since 1905 has a large variety of ethnicities and cultures. Therefore, the gubernatorial candidates in the gubernatorial election were filled by people of various ethnicities. From this relationship, this study examines how the relationship of ethnic identity politics to the achievement of sound sources, this research method uses qualitative methods, while the data collection techniques use triangulation techniques, namely in-depth interviews (in depth interviews), observation (observation) and documentation. Meanwhile, the object of research was Lampung residents with a sample of 25 people from various ethnic groups taken by purposive sampling. Data analysis techniques using descriptive qualitative analysis with the results of the data obtained indicate that in local democracies, especially in direct gubernatorial elections, the existence of ethnic identity politics plays an important role in the circulation of voting sources. The existence of inter-ethnic kinship in transmigration areas is undeniable, making the sense of solidarity stronger and this can be a gap for the gubernatorial candidate's success team to influence the people in determining the votes. Thus, the role of ethnic identity politics is used as a basis in determining political movements and becoming a political force to get votes.

Keywords: *Politics of Identity, Ethnicity, Election, Politics, Gubernatorial election*

Abstract

Pemilihan umum kerap melibatkan politik identitas dalam meraih sumber suara, politik identitas yang digunakan pun beraneka ragam mulai dari politik identitas etnis, budaya, hingga agama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan politik identitas etnis terhadap peraihan sumber suara, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi yaitu wawancara secara mendalam (*in depth interview*), pengamatan (*observasi*) dan dokumentasi. Objek penelitian adalah warga Lampung dengan sample sebanyak 25 orang dari berbagai etnis yang diambil secara purposive sampling. Hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam demokrasi lokal, terutama dalam pemilihan gubernur secara langsung, adanya politik identitas etnis berpengaruh terhadap pendulangan sumber suara. Adanya hubungan kekerabatan antar etnis di daerah transmigrasi, berdampak pada menguatnya rasa solidaritas semakin kuat dan hal ini bisa menjadi celah bagi tim sukses calon gubernur untuk memengaruhi rakyat dalam menentukan suara. Sehingga, peran politik identitas etnis tersebut dimanfaatkan sebagai landasan dalam menentukan gerakan politik dan menjadi sebuah kekuatan politik untuk mendapat dukungan suara.

Keywords: *Politik Identitas, Etnis, Pilkada, Politik, Pemilihan Gubernur*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut system demokrasi, tercatat ada 3 jenis demokrasi yang berlaku di Indonesia dimulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer dan yang masih berlaku adalah demokrasi pancasila. Demokrasi berarti menyerahkan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dimana rakyat ikut serta memilih pemimpin sesuai dengan aspirasi mereka dalam pemilu/pilkada yang merupakan bentuk saluran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang tertulis dalam UU No.22 Tahun 1999 dimana pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonominya sendiri, maka diberlakukan pula pemilihan kepala daerah sendiri secara langsung sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 .

Namun, otonomi daerah tidak hanya dipahami sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah. Lebih dari itu, salah satu dampak negative dari otonomi daerah adalah bagi banyak elite politik di daerah, kebijakan ini juga diperlakukan sebagai perumusan kembali dan penguatan garis-garis eksklusivisme dan parokhialisme. Akibatnya yang muncul kemudian adalah isu mengenai putra daerah, politik kesukuan, etnisitas birokrasi, politisasi agama, serta kebangkitan adat. ¹

Identitas merupakan pembeda antara suatu hal dengan yang lainnya. Identitas etnis adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh sekelompok orang yang dianggap sebagai inti dari diri mereka yang memiliki pemahaman, nilai-nilai dan ikatan emosional dengan etnis tersebut. Politik identitas adalah sikap atau keputusan politik didasarkan pada kepentingan atau pandangandari sebuah kelompok social dimana seseorang mengasosiasikan diirnya pada kelompok. tersebut dalam hal ini adalah dr segi etnis. Dalam hal ini, politik identitas etnis kerap dilakukan untuk meraup suara atas nama identitas yang melekat disetiap individu. Tidak hanya dalam meraup suara, dalam menentukan pilihan pun identitas menjadi salah satu pertimbangan penting bagi para pemilih. Politik identitas etnis banyak dilakuan atas dasar pemberian harapan dari seorang pemimpin atas kesamaan rasa dan kepercayaan bahwa jika sesama etnis akan lebih mengerti keadaan dan kebutuhan sesamanya.

Provinsi lampung merupakan provinsi paling selatan di ujung pulau sumatera yang dijadikan tonggak sejarah *transmigrasi* di Indonesia sejak tahun 1905, provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat transmigrasi untuk

¹ A.Budiman,2017 e-jurnal.lppmunsera.org

mengurangi populasi pulau jawa karena wilayahnya yang masih luas, adapun luas provinsi lampung adalah 35.376 km² Penduduk provinsi lampung pada Tahun 2018 berjumlah sekitar 8,289 juta jiwa, sebagai wilayah yang heterogenitas penduduknya terdiri dari berbagai etnis antara lain Jawa, Lampung, Batak, Semendo, Minang, Aceh dan China dengan penduduk etnis jawa tercatat sebagai penduduk terbesar di Lampung dengan presentase sebanyak 63,84%.

Dalam pilkada lampung 2018, terdapat 4 pasangan calon (paslon) yang ditetapkan KPU dalam pemilihan gubernur, yaitu pasangan calon nomor urut 1 H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si - Bachtiar Basri, SH., MM, yang diusung oleh partai demokrat dan gerindra, pasangan calon ini berasal dari etnis Lampung, Nomor urut 2 ditempati oleh Drs. H. Herman Hasanusi, MM - Ir. Sutono, MM, yang diusung oleh PDIP, pasangan calon ini berasal dari etnis Lampung dan Jawa, Nomor urut 3 ditempati oleh Ir. Arinal Djunaidi - Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn. Ph.D yang diusung oleh golkar, PKB dan PAN pasangan calon ini berasal dari etnis Lampng dan Jawa dan Nomor urut 4 ditempati oleh Dr. H. Mustafa, dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M. Si yang didukung oleh Nasdem, PKS serta Hanura, pasangan calon ini berasal dari etnis Lampung dan Jawa. Namun, ditengah masa kampanye, salah satu calon kepala daerah tersandung kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh *KPK* dengan dugaan menerima suap. Adapun, pencalonan paslon tersebut dalam pilkada tetap berlangsung hingga paslon tersebut dilantik jika memang memenangkan pilkada, sampai kasus yang menjeratnya berkekuatan hukum tetap. Paslon tersebut masih berpeluang mendulang suara karena masih mempunyai hak untuk dipilih. Kemudian, jika kasus paslon tersebut sudah diputus dan dinyatakan besalah, maka jabatan paslon tersebut akan dicabut kembali.

Keanekaragaman etnis di provinsi lampung berpengaruh pula pada variasi pemimpin daerah disana, pemimpin daerah tidak terbatas hanya pada putra daerah, namun banyak diisi oleh orang-orang dari etnis pendatang, terlihat dari setiap calon kepala daerah tidak hanya datang dari etnis Lampung, tapi etnis Jawa justru banyak mendominasi calon kepala daerah, disusul etnis-etnis yang lain. Tarikan antar putra daerah dan etnis pendatang pun terlihat sangat kuat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan politik identitas etnis dalam pilkada gubernur lampung 2018, dengan menghasilkan manfaat penelitian yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Penelitian ini juga dapat menjadi refrensi

dalam memahami teori-teori yang berhubungan dengan peranan etnisitas dalam politik local. Sedangkan secara praktis, Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat pengetahuan kepada pembaca khususnya, masyarakat pada umumnya, dan juga diharapkan dapat memberi masukan dalam rangka memecahkan permasalahan yang sama atau untuk melakukan penelitian selanjutnya.

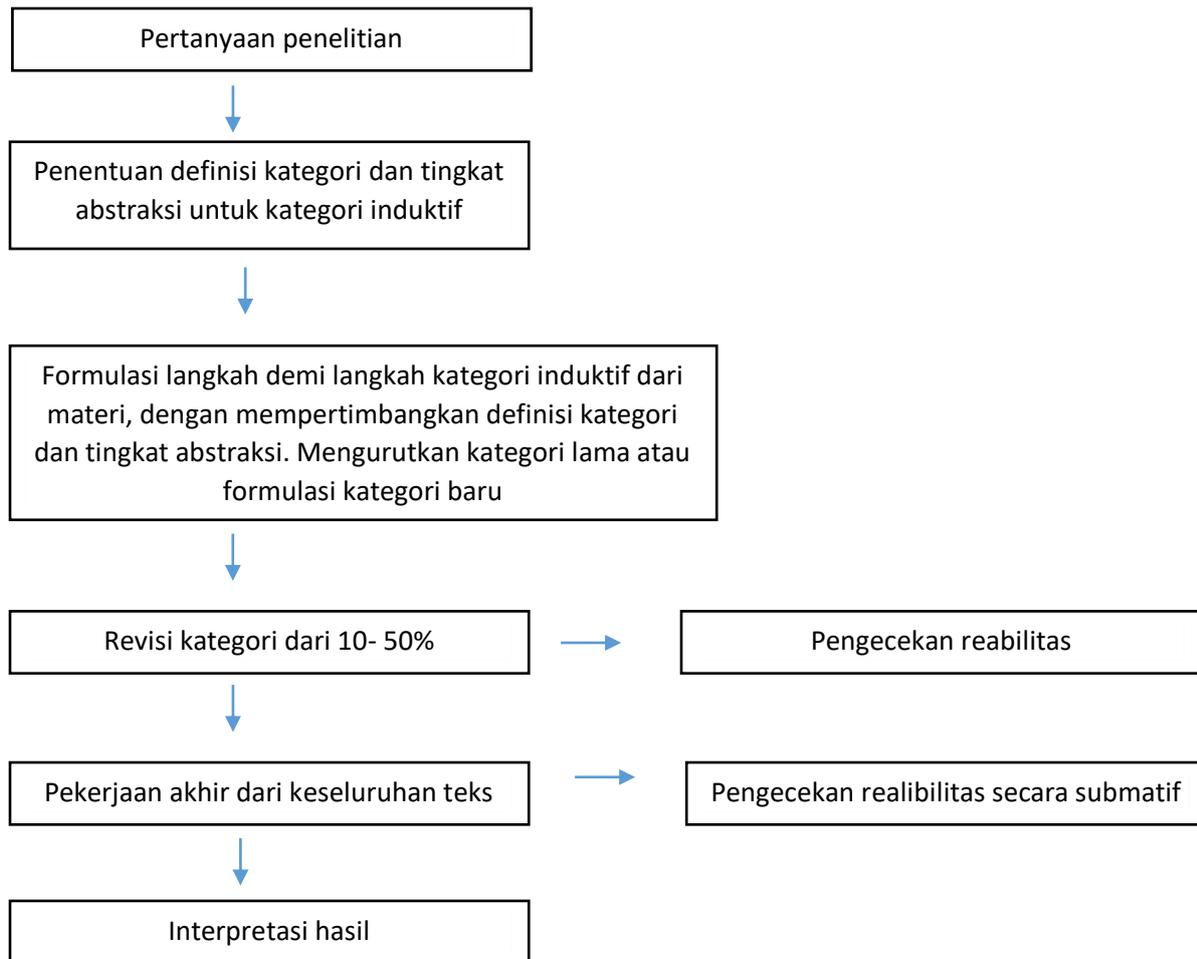
METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2013:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sementara itu, Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan oleh sugiyono (Prastowo, 2014: 197) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi social tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi social tersebut, objek penelitian adalah warga Lampung dengan sample sebanyak 25 orang dari berbagai etnis yang diambil secara purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi yaitu wawancara secara mendalam (*in depth interview*), pengamatan (*observasi*) dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis descriptive kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat di Lampung. Rincian 25 orang yang diambil 5 dari Etnis Jawa, 5 dari etnis Lampung, 5 dari etnis Minang, 5 dari etnis Batak, dan 2 dari etnis Tionghoa dan 3 etnis Palembang yang ada di Lampung dan masing-masing satu orang dari partai politik yang mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Lampung yakni partai PPP dan PAN.

HASIL PENELITIAN

Hasil wawancara peneliti kepada beberapa masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pemilihan pilkada menunjukkan beberapa pendapat, peneliti menganalisisnya dengan analisis konten kualitatif menurut *philipp mayring* dengan table sebagai berikut;



a. Etnisitas sebagai pertimbangan memilih

Banyak faktor yang menentukan seseorang dalam memilih calon kepala daerah, salah satunya adalah faktor etnisitas, berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan terwawancara mengenai apakah mereka masih menggunakan etnisitas dalam pertimbangan memilih mereka,

Bapak Umar Sofyan yang berasal dari etnis Jawa, mengatakan bahwa

“ Pasti, soalnya jika satu etnis akan lebih paham karakternya. Biasanya karakter suku kan ada, jawa begini, lampung begini, ...dan saya yakin jika etnis jawa bisa memimpin dengan baik”

Ibu annisa dwi K yang berasal dari etnis batak menyatakan

“kalau berbicara suku memang itu priorotas saya dalam memilih, namun bukan prioritas utama. Keputusanku memilih tetap melihat dari pertimbangan kemampuan dia dan pengalaman, prestasi akademik maupun prestasi dalam pemerintahan. Kesamaan suku itu mendukung, namun bukan alasan utama”.

Reza fella yang berasal dari etnis sunda,

“ kemarin calonnya gak ada orang sunda kak, tapi kalau misal ada saya kemungkinan besar memilih orang sunda sebagai bentuk dukungan, soalnya jarang orang sunda masuk jadi calon pemimpin daerah, tapi tetap jika kompetensi mereka seimbang saya akan memilih suku saya sendiri”

Fandi ahmad yang merupakan keturunan tionghoa dan jawa menyatakan

“Kalau saya, jika ada pemimpin yang satu suku, apaagi didaerah transmigrasi seperti ini tentu akan memprioritaskan yang satu suku dengan saya, karena terwakilkan sesama suku diharapkan akan lebih mengerti “.

Dari pernyataan beberapa informan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa beberapa masyarakat masih menggunakan factor etnisitas sebagai factor pertimbangan dalam emmilih pemimpin daerah. Berikut adalah table hasil wawancara:

Table 1.



b. Pendapat Adanya Politik Identitas Etnis Dalam Pilkada

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan terwawancara mengenai eksistensi Politik Identitas Etnis dalam Pilkada ;

Ibu wening yang berasal dari etnis padang menyatakan

“ politik identitas etnis sulit dihilangkan dari Indoensia, istilah anak daerah lebih dipercaya oleh daerahnya karena secara logika merekalah yang paham tentang daerahnya maka anak daerah akan mudah diterima ”

Ibu annisa dwi K yang berasal dari etnis batak menyatakan ;

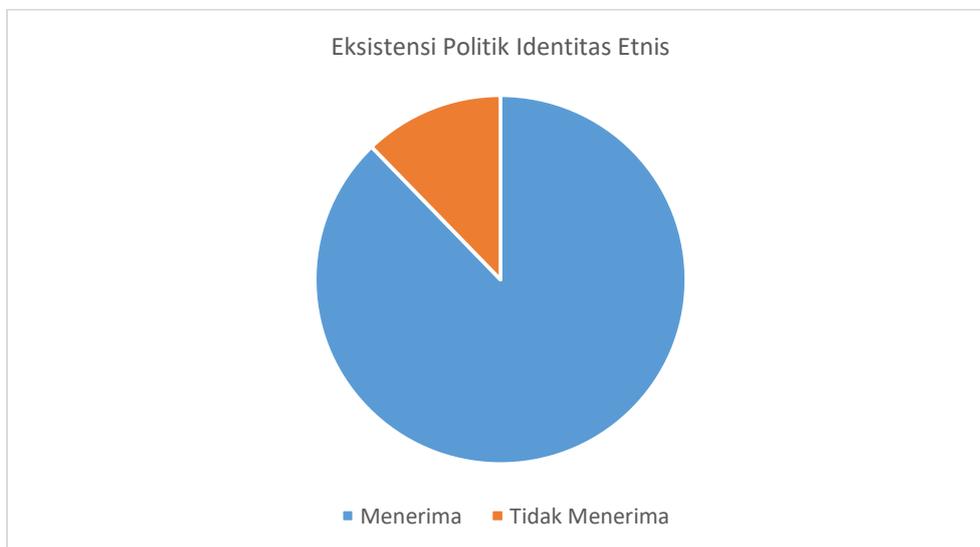
“ menurut saya adanya politik etnis itu tidak masalah sih, karena setia orang punya hak untuk menentukan pilihan politiknya, entah itu dilandasi kecenderungan etnis ataupun hal lain. Selama tujuannya untuk tercipta suatu system pemerintahan yang baik atau tidak menyalahi aturan, menurutku pribadi ga ada masalah ”.

Menurut reza nawafella yang berasal dari etnis sunda menyaakan

“ politik identitas etnis sudah biasa terjadi. Hal yang lumrah. Jadi gak ada salalnya masyarakat memilih berdasarkan suku, identitas etnis bisa menjadi nilai tambah bagi si calon kepala daerah. So why not?”

Dari pernyataan beberapa informan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa beberapa masyarakat menanggap politik identitas etnis itu wajar karena identitas seorang itu sudah melekat dan perasaan ingin terwakili itu masih ada. Berikut adalah table hasil wawancara:

Table 2.



c. Politik Identitas Etnis Digunakan Politisi Dalam Mendulang Suara

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan terwawancara mengenai Politik Identitas Etnis yang digunakan Politisi Dalam Mendulang Suara

Menurut nanang tri handoko timses kader PAN

“ di alam demokrasi sebenarnya punya “ hak dan kedudukan” yang sama tiap idnividu idealnya tidak boleh menggunakan politik identitas tapi itu sudah menjadi kebiasaan, jadi ya sah-sah saja”.

Sedangkan menurutmu Ali muzaki, timses kader PPP mengemukakan bahwa

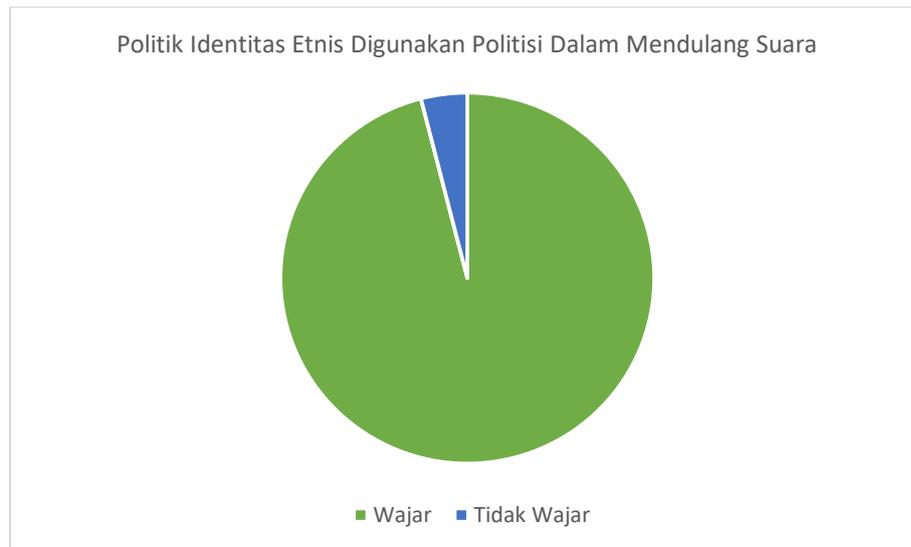
“adanya politisi menggunakan politik identitas dalam mendulang suara adalah sah karena tidak dilarang dan diatur di undang-undang. Hal tersebut memang tidak bias dihindarkan, akan tetapi, tetap paslon harus memberi program kerja yang baik agar benar-benar worth it untk dipilih. “.

Sementara, dipihak lain juga memberikan jawaban yang serupa, Bapak abdul dari suku jawa menyatakan:

“ sah saja seorang politisi menggunakan politik identitas etnis dalam meraih suara karena tidak dilarang oleh undang-undang, terlebih itu malah menjadi nilai tambah pasangan calon, namun tetap program kerja yang akan menentukan pergerakan paslon. “

Dari pernyataan beberapa informan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa beberapa masyarakat menganggap politik identitas etnis yang digunakan politisi dalam mendulang suara adalah sah, karena tidak dilarang dalam undang-undang. Namun, kualitas pribadi dan program kerja yang baik adalah factor yang membuat kita layak dipilih dan menjadi pemimpin. Berikut adalah table hasil wawancara:

Table 3.



SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa, politik identitas etnis masih kental dikalangan masyarakat, terutama di daerah transmigrasi karena kesamaan rasa sukuisme di wilayah yang heterogenic. Etnisitas tetap menjadi prioritas beberapa pemilih sebagai bentuk dukungan karena satu suku, namun itu bukan merupakan satu-satunya alasan, sebab para pemilih tetap melihat dari track record, prestasi akademik, prestasi pemerintahan dan attitude para calon. Adanya politik identitas etnis di masyarakat sulit untuk dihilangkan karena rasa keterwakilan dan juga suatu etnis lah yang akan lebih paham dengan etnis sesamanya.

Sedangkan untuk politisi, penggunaan politik identitas etnis untuk mendulang suara dirasa wajar dan sah serta menjadi nilai tambah bagi calon kepala daerah yang beretnis sesuai dengan daerah tempat mereka mencalonkan diri, maka besar kemungkinan mendapatkan suara terbanyak. Adanya hubungan kekerabatan antar etnis di daerah transmigrasi, tidak dipungkiri, membuat rasa solidaritas semakin kuat dan hal ini bisa menjadi celah bagi tim sukses calon gubernur untuk memengaruhi rakyat dalam menentukan suara. Namun, dukungan etnisitas tetap harus diimbangi dengan kompetensi, trackrecord, dan prestasi yang baik dari sang calon pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdilah, Ubed. 2002 “Politik identitas etnis: Pergulatan tanda tanpa identitas” Jakarta. Transmedia Pustaka.

Dega Okta Munaleza. 2010 ETNISITAS DAN POLITIK LOKAL PROVINSI LAMPUNG. Universitas Diponegoro . Semarang.

Hemay, Idris. 2015. Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan

Ilyas Lampe,” Identitas Etnik dalam Komunikasi Politik” Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 3, September - Desember 2010.

Mitra Bestari, 2018. Jurnal Adhyasta Pemilu. VOLUME 4 I NO. 1 I TAHUN 2018

Moleoeng, J lexy. 2017 “ Metodologi Penelitian Kualitatif”. Editor Iman taufik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sagala, I.D. & Mukmin, B.A. (2018). Politik Identitas Etnis dalam Pilkada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2015. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 4 (1): 139-151.

Sugiyono, 2016. METODE PENELITIAN, kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung,: ALFABETA cv.

Syafarudin, Darmawan Purba, “ANALISIS ORIENTASI, SIKAP, PILIHAN, DAN BUDAYA POLITIK PEMUDA-PEMUDI ETNIS LAMPUNG ERA KONTEMPORER “JURNAL ANALISIS SOSIAL POLITIK VOLUME 1, NO 1, JULI 2017

<https://lampung.kpu.go.id/>

<https://www.lampungprov.go.id>